

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga akan menjadi batu sandungan dalam era globalisasi, karena era globalisasi merupakan era persimpangan mutu. Jika bangsa Indonesia ingin berkiprah dalam percaturan global, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menata sumber daya manusia, baik dari aspek intelektual, spiritual, kreativitas, moral, maupun tanggung jawab. Kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan kinerja (*performance*).

Sebagai unsur aparatur pemerintah, pegawai sekaligus sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemikir, perencana, penggerak partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sekaligus berperan sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini sangat jelas bahwa kedudukan dan peranan pegawai negeri sangat penting, sebagai mana dikemukakan didalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan

secara adil dan merata.

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (*out-come*). Bila diperhatikan lebih lanjut apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan adalah suatu proses yang mengolah in-put menjadi out-put (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis. Mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat kemampuan individu dalam pencapaiannya, terutama tujuan organisasi.

Kinerja pegawai adalah merupakan sejauh mana pegawai tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam arti kata pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan untuk tercapainya kinerja pegawai dengan baik. Maka pegawai dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah sesuai dengan tugas yang dibebankan. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus memiliki keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Dengan kata lain kinerja individu dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri adalah perasaan individu terhadap pekerjaannya.

Manajemen kinerja memberikan manfaat bukan hanya bagi organisasi, tetapi juga manajer, dan individu. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi antara lain adalah dalam menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses

pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, mengusahakan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan, mengusahakan basis perencanaan karier, membantu menahan pekerja terampil untuk tidak pindah, mendukung inisiatif kualitas total dan pelayan pelanggan, dan mendukung perubahan budaya.

Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas kinerja dengan uraian/deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu biasanya setiap akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan kualitas kerja, pembinaan selanjutnya, tindakan perbaikan atas pekerjaan yang kurang sesuai deskripsi pekerjaan, serta untuk keperluan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan lainnya.

Jika dilihat dari pegawai yang kurang menanggapi prosedur yang sudah ditetapkan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga masih banyaknya pegawai yang pada saat jam kerja tidak berada ditempat. Hal ini juga diakibatkan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan, ada pegawai yang berlatar belakang pendidikan SMA tetapi pekerjaannya mengarsip surat dan secara nyata dapat dilihat dari kondisi-kondisi yang ditemukan sebagai berikut: prosedur administrasi belum berjalan sebagaimana mestinya, penerapan prosedur administrasi proyek yang kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemberian tugas tidak sesuai dengan latarbelakang yang dimiliki pegawai, jadwal pelaksanaan proyek pembangunan yang tidak tepat waktu, adanya keengganan pegawai untuk bekerja lebih optimal.

Berdasarkan pengamatan dilapangan dari segi disiplin waktu

bekerja masih ditemukannya pegawai yang kurang memanfaatkan waktu secara baik, hal ini dilihat masih adanya pegawai hadir lewat dari waktu yang telah ditetapkan seharusnya jam masuk kantor adalah pukul 07.00 WIB pagi tetapi hadir pukul 08.00 WIB pagi, begitu juga pada saat jam makan siang dan istirahat pukul 12.00-13.00 WIB tetapi pada kenyataannya masih ditemukannya pegawai yang masuk kembali ke kantor pukul 14.00 WIB bahkan ada juga yang pukul 14.30 WIB. Disamping itu juga pegawai dalam menyikapi pekerjaan lebih kepada cepat selesai, sehingga ditemukannya kurang ketelitian pegawai dan kurangnya kemauan yang kuat dalam mempelajari tugas dan kewajibannya.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu instansi pemerintah yang berhubungan langsung dalam meningkatkan pelayanan yang ada di provinsi tersebut, dalam perannya Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas penting dalam mempersiapkan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama. Oleh, karena itu pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah hendaknya dapat meningkatkan kinerjanya agar kualitas kinerja meningkat dan capaian kinerja memiliki nilai yang baik dari tahun ke tahun.

Kinerja Pegawai di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tergambar dari Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (tahun berjalan) Biro Pemerintahan, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (tahun berjalan) Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
4.01 . 4.01.3 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran, sarana dan prasama perkantoran								
4.01 . 4.01.3 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan komunikasi internet	60	12	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	40%
4.01 . 4.01.3 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya biaya administrasi pengelolaan keuangan	60	12	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24	40%
4.01 . 4.01.3 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya biaya perbaikan peralatan kerja	55	11	11 Jenis	11 Jenis	100%	11 Jenis	22	40%
4.01 . 4.01.3 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya penunjang ATK Biro	150	30	30 Jenis ATK	30 Jenis ATK	100%	30 Jenis ATK	60	40%
4.01.4.01.3.01.11	Penyediaan barang	Jumlah barang cetakan	45	9	9 Jenis	9 Jenis	100%	9 Jenis	18	40%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
	cetakan dan penggandaan	dan penggandaan			Cetakan	Cetakan		Cetakan		
4.01 . 4.01.3 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	20	4	4 Jenis	4 Jenis	100%	7 Jenis	8	40%
4.01 . 4.01.3 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mewujudkan tertib administrasi pengadaan tanah bagi kepentingan umum								
4.01 . 4.01.3 . 05 . 136	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Umum, Otonomi, Daerah, Kerjasama Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	40	0	0	0	0	10 Orang	0	0%
4.01 . 4.01.3 . 15	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah daerah								
4.01 . 4.01.3 . 15 . 24	Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah	10	1	1	1	100%	3Fasilitasi Kerjasama /Dokumen	2	20%
4.01 . 4.01.3 . 15 .	Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama	Jumlah Tim TKKSD di Kab/Kota	70	14	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	14 Kab/Kota	28	40%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
28	Daerah Kabupaten/Kota				dan 1 TIM TKKSD Prov. Kalteng	dan 1 TIM TKKSD Prov. Kalteng		dan 1 TIM TKKSD Prov. Kalteng		
4.01 . 4.01.3 . 15 . 45	Koordinasi, Evaluasi dan Inventarisasi Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah	Jumlah laporan dalam koordinasi, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah	8	0	0	0	0	2	0	0%
4.01 . 4.01.3 . 15 . 46	Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Kementerian / Lembaga	Jumlah fasilitasi pelayanan kunjungan legislative dan instansi K/L di Prov.Kalteng	5	1	1	1	100%	1 Laporan	2	40%
4.01 . 4.01.3 . 15 . 47	Kordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Antar Instansi	Jumlah laporan dalam koordinasi, evaluasi dan inventarisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah	5	0	0	0	100%	1 Laporan	0	0%
4.01 . 4.01.3 . 15 . 48	Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri	Jumlah laporan fasilitasi urusan izin perjalanan dinas/non dinas ke luar negeri	10	0	0	0	100%	1 Laporan	0	0%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
2.04 . 4.01.3 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro								
2.04 . 4.01.3 . 16 . 07	Persiapan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	3	1	1	1	100%	1 Kegiatan	2	67%
4.01 . 4.01.3 . 17	Program Otonomi Daerah									
4.01 . 4.01.3 . 17 . 01	Penguatan Kelembagaan Kecamatan (PATEN) se-Kalteng	Jumlah dokumen fasilitasi pelayanan administrasi kecamatan terpadu	5	1	1	1	100%	1 dokumen	2	40%
4.01 . 4.01.3 . 17 . 04	Peningkatan Kinerja Sekretariat Tim Koordinasi Pemilihan	Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah di Prov.Kalteng	14	1	1	1	100%	2 Kabupate n/ fasilitasi	2	14%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
	Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah									
4.01 . 4.01.3 . 17 . 12	Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah se-Kalteng	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah se-kalteng	10	2	2	2	100%	2 Kegiatan	4	40%
4.01 . 4.01.3 . 17 . 15	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat LPPD Prov. Kalteng di tingkat nasional, Penyampaian LKPJ Gubernur	Sangat Tinggi, Tepat Waktu	Predikat Tinggi, Tepat Waktu	Predikat Tinggi, Tepat Waktu	Predikat Tinggi, Tepat Waktu	100%	2 Laporan (LPPD Predikat Tinggi, LKPJ Tepat waktu)	Predikat Tinggi, Tepat Waktu	Predikat Tinggi, Tepat Waktu
4.01 . 4.01.3 . 17 . 16	Koordinasi dan Monev Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas LPPD Pemerintah Kab/Kota	14 Kab/Kota	0	7	7	100%	7 Kab/Kota	7	50%
4.01 . 4.01.3 . 17 . 17	Pembinaan Penataan Wilayah Kab/Kota di Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen pembinaan penataan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan	3	1	1	1	100%	1 dokumen	2	67%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
4.01 . 4.01.3 . 17 . 18	Konsultasi dan Koordinasi Administrasi dan Izin Keluar Negeri Dinas/Non Dinas Bagi Pejabat Negara/Daerah	Jumlah fasilitasi pembinaan penataan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan	6	1	1	1	100%	2 Fasilitasi	2	33%
2.04 . 4.01.3 . 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro								
2.04 . 4.01.3 . 17 . 06	Penanganan Pertanahan/Lahan	Jumlah Fasilitasi Penanganan Sengketa lahan/pertanahan	4	1	1	1	100%	1 Fasilitasi	2	50%
2.04 . 4.01.3 . 17 . 08	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Sengketa Lahan/Pertanahan	Jumlah fasilitasi pembinaan pertanahan	3	1	1	1	100%	1 Fasilitasi	2	67%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
4.01 . 4.01.3 . 33	Program Pemerintahan Umum	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Toponimi, Tata Batas, Pertanahan Serta Administrasi Tata Kelola Biro								
4.01 . 4.01.3 . 33 . 03	Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Data Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	3	1	1	1	100%	1 Laporan	2	67%
4.01 . 4.01.3 . 33 . 04	Kegiatan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI)	Terbayarnya Iuran Keanggotan APPSI	5	1	1	1	100%	1 Tahun	2	40%
4.01 . 4.01.3 . 33 . 09	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar	Jumlah Segmen Penegasan batas adm. Pemerintahan kab/kota yang diusulkan ke	23	18	18	18	100%	5 Segmen Batas	36	157%

Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu			Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2019	Realisasi Renja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7	11=(10/4)
	Daerah	kemendagri								
4.01 . 4.01.3 . 33 . 11	Penyiapan Informasi Nama Rupa Bumi di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah usul draft dokumen topinimi unsur buatan	5	2	2	2	100%	1 dokumen	4	80%
4.01 . 4.01.3 . 33 . 18	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di prov. kalteng	5	1	1	1	100%	1 Tahun	2	40%
4.01 . 4.01.3 . 33 . 27	Koordinasi dan Fasilitas Konsultasi Serta Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Kelembagaan dan Aparatur Desa)	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kelembagaan dan Aparatur Desa)	5	0	2	5	250%	4 Fasilitasi	5	70%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bagaimana gambaran kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara umum dapat dilihat dari beberapa aspek dan salah satunya adalah dari Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 ini. Masih terlihat banyaknya target perencanaan yang belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pada kondisi ini diasumsikan bahwa kinerja pegawai dan semangat pegawai dalam melaksanakan tugas dan program pemerintah kurang maksimal dan budaya kerja pula mengakibatkan semakin rendahnya pencapaian target tersebut.

Selanjutnya jenjang pendidikan juga sangat mempengaruhi kinerja seseorang, karena latar belakang ini memiliki dampak yang sangat kuat dalam membentuk sikap dan mental seorang pekerja yang handal (profesional) dan pekerja keras. Keaktifannya dalam bekerja bukan berdasarkan pada materi, tetapi sudah diarahkan kepada pembentukan prestasi dan produktivitas. Adapun tingkat pendidikan Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jenjang Pendidikan Pegawai

No	Tingkat Pendidikan Pegawai	Jumlah (Orang)	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMA	4	5
4.	D1/D2/D3	-	-
5.	S1	26	15
6.	S2	2	4
Jumlah		32	24

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2020 yang sudah diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah lebih didominasi oleh pegawai dengan jenjang pendidikan sarjana (S1) dan didominasi oleh laki-laki. Jenjang pendidikan tentu berimplikasi pada kinerja serta pemahaman atas pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai yang bersangkutan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat dikatakan cukup baik karena melihat situasi dan kondisi sosial, ekonomi serta persoalan yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat kompleks, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada mereka agar dapat bekerja lebih optimal didalam menjalankan roda pemerintahan.

Tingkat kehadiran pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 merupakan salah satu faktor yang utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi pada situasi Pandemi Covid 19 tingkat kehadiran pegawai menjadi tidak maksimal dikarenakan pengaturan kehadiran kerja 50% dan beberapa kali kejadian isolasi kantor terkait kasus pegawai yang terpapar Covid 19. Indikator kehadiran pegawai di kantor tidak dapat dijadikan gambaran kinerja dan tentunya sangat tidak sesuai dengan kondisi ideal sesuai dengan harapan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran persepsi pegawai terkait kinerjanya dengan menetapkan judul "Analisis Kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang ditemui, maka dapat ditarik perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk menambah literasi kajian pada pokok bahasan Kinerja Pegawai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memberikan gambaran kondisi kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga secara praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia bagi optimalisasi capaian tujuan organisasi.